



Implementasi Ketahanan Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

Muhammad Fuad Mubarak*¹, Maimun², Abdul Qodir Zaelani³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

E-mail: fuadmubarak1998@gmail.com, maimun@radenintan.ac.id, abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-01-10 Revised: 2025-02-20 Published: 2025-03-11 Keywords: <i>Family Resilience;</i> <i>Family Harmony;</i> <i>Women Empowerment;</i> <i>Family Counseling;</i> <i>Family Economic Empowerment.</i>	This study aims to examine the implementation of the concept of family resilience in the Women's Empowerment and Child Protection Service (PPPA) of Lampung Province, and its implications for family harmony. Family resilience, which includes physical, mental, and economic resilience, is considered an important factor in maintaining family harmony. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis method. The results of the study indicate that programs run by the PPPA Service of Lampung Province, such as family counseling, women's empowerment, and family economic empowerment, have succeeded in increasing family resilience. These programs have been proven to contribute to the creation of harmonious families, especially in overcoming emotional, economic, and social problems. In addition, the implementation of family resilience is also in accordance with the principle of maqāsid al-syarī'ah, which prioritizes religious values in strengthening family resilience. This study concludes that family resilience has a significant role in creating family harmony and welfare.
Artikel Info Sejarah Artikel Diterima: 2025-01-10 Direvisi: 2025-02-20 Dipublikasi: 2025-03-11 Kata kunci: <i>Ketahanan Keluarga;</i> <i>Keharmonisan Keluarga;</i> <i>Pemberdayaan Perempuan;</i> <i>Konseling Keluarga;</i> <i>Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.</i>	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi konsep ketahanan keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. Ketahanan keluarga yang meliputi ketangguhan fisik, mental, dan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung, seperti konseling keluarga, pemberdayaan perempuan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga, telah berhasil meningkatkan ketahanan keluarga. Program-program ini terbukti berkontribusi terhadap terciptanya keluarga yang harmonis, terutama dalam mengatasi masalah emosional, ekonomi, dan sosial. Selain itu, implementasi ketahanan keluarga juga sesuai dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah, yang mengedepankan nilai-nilai agama dalam memperkuat ketahanan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

I. PENDAHULUAN

Hidup berpasang-pasangan merupakan sunatullah yang berlaku pada makhluk-Nya, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan, dan Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan sebagai hubungan yang sakral. Pernikahan dalam Islam adalah perintah Allah dan Rasul-Nya, yang lebih dari sekedar menjaga keturunan, tetapi juga sebagai upaya menjalankan perintah Allah (Bakri, 1993). Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW menekankan pentingnya menikah sebagai bagian dari sunah-Nya, dan bagi yang tidak mampu, disarankan untuk dapat berpuasa (Muhammad, 2009). Tujuan utama pernikahan adalah membangun keluarga yang harmonis, yang mencakup ketentraman, kecintaan, dan kasih sayang. Undang-undang Perkawinan di

Indonesia juga mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan ajaran agama (Lasifah, 2019). Dalam al-Qur'an, dijelaskan bahwa pernikahan bertujuan menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat (Q.S. al-Rūm [30]: 21).

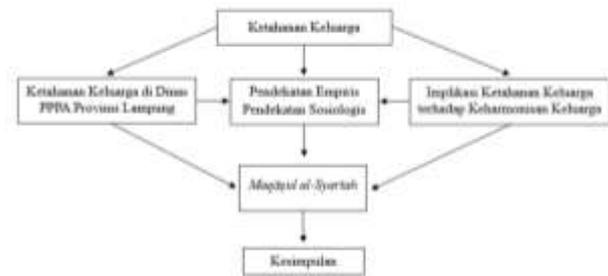
Keharmonisan keluarga tercipta ketika suami istri hidup dalam ketenangan, merasa puas dengan apa yang ada, dan mampu menjalankan tugas keluarga baik di dalam maupun luar rumah, termasuk dalam urusan nafkah dan hubungan sosial (Br Kembaren, 2016). Faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga meliputi kematangan emosi, perhatian, pengetahuan, manajemen keluarga, serta usia saat menikah, yang berkaitan dengan pengenalan diri dan penyesuaian diri (Br Kembaren, 2016).

Ketahanan keluarga, yang mencakup keuletan, ketangguhan, serta kemampuan fisik dan material untuk hidup mandiri, menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Ketahanan keluarga dipengaruhi oleh kondisi eksternal, seperti lingkungan yang sehat dan baik, serta internal keluarga yang kuat secara mental (Husnah, 2022).

Keluarga juga berperan sebagai lingkungan sosial pertama yang mengajarkan cinta kasih, moral, dan nilai-nilai agama serta sosial budaya. Keluarga yang memiliki ketahanan yang baik dapat menangkal pengaruh negatif dari lingkungan sosial (Prayitno, 2021). Selain itu, ketahanan keluarga juga berarti pengembangan diri individu dan keluarga untuk hidup harmonis dan sejahtera, baik lahir maupun batin, yang juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar serta pendidikan dan juga pengembangan pribadi (Musyarofah, 2021). Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018, mengatur pembangunan ketahanan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga secara seimbang dalam aspek fisik, sosial, dan mental-spiritual.

Ketahanan keluarga menjadi aspek penting bagi keluarga untuk tidak hanya bertahan dari krisis, tetapi juga mengembangkan potensi anggotanya (Cahyaningtyas, 2016; Walsh, 2002). Data BPS Provinsi Lampung menunjukkan adanya peningkatan kasus perceraian, yang dipengaruhi oleh perselisihan, masalah ekonomi, dan ketidaksetiaan. Dalam menanggulangi hal ini, Dinas PPPA Provinsi Lampung melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui kegiatan konseling, dengan fokus pada aspek pengetahuan dasar keluarga serta aspek ekonomi sebagai penentu ketahanan keluarga (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2023). Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi konsep ketahanan keluarga di Dinas PPPA Provinsi Lampung penting untuk dibahas dalam rangka mewujudkan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengkaji implementasi konsep ketahanan keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung. (2) Untuk mengkaji implikasi konsep ketahanan keluarga terhadap keharmonisan keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung. (3) Untuk menganalisis tinjauan *maqāsid al-syarī'ah* terhadap implementasi konsep

ketahanan keluarga dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan cara rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2002). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mempelajari objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data gabungan, dan analisis data induktif (Kuntur, 2004). Penelitian ini juga menggunakan studi kasus untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perorangan atau kelompok terkait dengan faktor atau interaksi di dalamnya (Sunggono, 2003). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan keadaan atau hubungan fenomena secara mendetail, khususnya tentang ketahanan keluarga dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, yakni lembaga yang terkait dengan pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung. Data sekunder diperoleh dari publikasi yang relevan, seperti buku hukum dan jurnal yang mendukung penelitian ini (Marzuki, 2008). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung implementasi ketahanan keluarga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung. Wawancara bebas terpimpin dilakukan dengan informan yang relevan, seperti ibu Reni Maisari, Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga di Dinas PPPA. Dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian (Herdiansyah, 2010).

Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih orang yang dianggap paling tahu tentang topik yang diteliti (Sugiyono). Informan utama adalah Kepala Dinas

PPPA Provinsi Lampung dan Kabid terkait, sementara informan pendukung adalah staf yang terlibat dalam program implementasi ketahanan keluarga.

Metode pengolahan data melibatkan pemeriksaan data untuk mengecek kelengkapan dan juga konsistensi jawaban responden, rekonstruksi data untuk menyusun data secara logis, dan sistematisasi data untuk menyusunnya berdasarkan urutan masalah (Hasan, 2002; Winarto, 2008; Nana Sujana). Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analisis, yang melibatkan pengumpulan, penyusunan, dan interpretasi data untuk memberikan gambaran lengkap tentang situasi yang ada (Winarto, 1994). Analisis kualitatif dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang keadaan hukum dan peristiwa sosial yang relevan (Anwar, 1975).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Konsep Ketahanan Keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Implementasi konsep ketahanan keluarga di Dinas PPPA Provinsi Lampung berfokus pada penguatan fungsi keluarga untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan lahir maupun batin. Konsep ini mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan regional yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya lokal. Dengan demikian, pendekatan yang diterapkan tidak hanya berbasis teori, tetapi juga memperhatikan konteks kebutuhan masyarakat setempat. Konsep ketahanan keluarga mencakup berbagai dimensi, seperti ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual yang semuanya saling berhubungan untuk menciptakan keluarga yang tangguh.

Dinas PPPA mendasarkan programnya pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Regulasi ini menekankan pentingnya pemberdayaan keluarga sebagai unit sosial terkecil untuk mencegah masalah sosial seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan disintegrasi keluarga. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penguatan bagi setiap anggota keluarga sehingga mampu menghadapi tantangan sosial dan ekonomi secara lebih mandiri.

Program-Program Unggulan Program-program unggulan yang dilaksanakan meliputi konseling keluarga, pelatihan

keterampilan bagi perempuan, dan seminar penguatan nilai-nilai keluarga. Selain itu, program edukasi dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya peran keluarga dalam pembangunan sosial juga menjadi prioritas. Program konseling keluarga, misalnya, dirancang untuk dapat membantu keluarga mengatasi konflik internal dan memperkuat komunikasi antar anggota keluarga.

Pelaksanaan program ketahanan keluarga melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini memastikan bahwa program-program yang dirancang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga. Keterlibatan berbagai pihak juga memungkinkan terciptanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh keluarga. Evaluasi implementasi menunjukkan bahwa program-program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya fungsi keluarga. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program secara lebih luas. Evaluasi ini juga mengungkapkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dan kualitas pelaksanaan di lapangan.

Dampak positif dari program ketahanan keluarga mencakup penurunan angka perceraian di beberapa wilayah dan peningkatan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif. Hal ini sejalan dengan tujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, program ini juga memberikan dampak positif dalam hal pengurangan konflik keluarga dan peningkatan kualitas hubungan antar anggota keluarga. Meskipun telah memberikan dampak positif, program ini menghadapi kendala seperti kurangnya akses masyarakat terhadap layanan konseling keluarga, terutama di daerah terpencil. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam program ini masih fluktuatif. Kendala lainnya termasuk rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan keluarga sebagai upaya preventif terhadap berbagai masalah sosial.

Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan program ketahanan keluarga semakin penting. Platform digital dapat digunakan untuk memperluas jangkauan program edukasi dan konseling, khususnya di

tengah pandemi yang membatasi interaksi langsung. Teknologi informasi juga memungkinkan penyebaran informasi secara lebih cepat dan efisien kepada masyarakat luas.

Dinas PPPA perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas untuk memastikan keberlanjutan program. Penggalangan dana dan pelibatan sektor swasta juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Strategi keberlanjutan ini harus mencakup pelatihan bagi pelaksana program agar mampu memberikan layanan yang lebih efektif. Kebijakan lokal perlu memperhatikan keterpaduan program ketahanan keluarga dengan kebijakan pembangunan lainnya. Integrasi ini akan mendorong terciptanya sinergi yang kuat antara sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dalam mendukung keluarga yang harmonis. Selain itu, kebijakan lokal juga harus mendorong inovasi dalam pelaksanaan program untuk menjawab tantangan yang terus berkembang.

Keluarga tidak hanya menjadi unit sosial terkecil tetapi juga merupakan fondasi bagi masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, ketahanan keluarga memberikan dampak yang signifikan terhadap ketahanan sosial secara keseluruhan. Implementasi program yang mendukung peran keluarga dapat memberikan manfaat luas bagi pembangunan sosial. Perempuan memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan ketahanan keluarga. Dinas PPPA memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan dan akses ke sumber daya ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian perempuan sehingga mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendukung keluarganya.

Anak-anak juga merupakan bagian penting dari ketahanan keluarga. Program edukasi dan pembinaan untuk anak-anak menjadi salah satu upaya Dinas PPPA dalam menciptakan generasi yang tangguh dan berkontribusi pada keharmonisan keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tangguh cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Ketahanan keluarga tidak dapat terwujud tanpa keterlibatan aktif dari laki-laki sebagai kepala keluarga. Program Dinas PPPA juga menargetkan peningkatan peran laki-laki dalam menciptakan hubungan yang harmonis

di dalam rumah tangga, terutama melalui pelatihan komunikasi dan manajemen konflik.

Pendidikan memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan keluarga. Dinas PPPA bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya ketahanan keluarga, baik bagi siswa maupun orang tua. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang peran penting keluarga dalam membangun masa depan generasi berikutnya. Ketahanan keluarga juga berkaitan erat dengan kesehatan fisik dan mental anggotanya. Dinas PPPA mengintegrasikan program ketahanan keluarga dengan layanan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan rutin dan konseling psikologis, untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki kualitas hidup yang baik.

Petugas lapangan memiliki peran penting dalam pelaksanaan program ketahanan keluarga. Oleh karena itu, Dinas PPPA memberikan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelatihan ini mencakup keterampilan komunikasi, penanganan konflik, dan pemahaman tentang nilai-nilai keluarga. Partisipasi komunitas menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program ketahanan keluarga. Dinas PPPA mendorong keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, pemimpin komunitas, dan organisasi lokal, untuk mendukung pelaksanaan program.

Kampanye publik secara rutin juga terus dilakukan oleh Dinas PPPA Lampung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan keluarga. Kampanye ini mencakup penyebaran informasi melalui media sosial, brosur, dan seminar untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Untuk menjawab tantangan yang terus berkembang, Dinas PPPA terus mengembangkan inovasi dalam program ketahanan keluarga. Inovasi ini mencakup penggunaan teknologi digital, pendekatan berbasis data, dan pelibatan lebih banyak stakeholder untuk menciptakan dampak yang lebih besar.

Dinas PPPA Provinsi Lampung telah menunjukkan komitmen kuat dalam implementasi program ketahanan keluarga melalui berbagai kegiatan strategis. Salah satu program utamanya adalah penyediaan layanan pengasuhan selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang bertujuan

untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Program ini menyoal pasangan usia subur, ibu hamil, dan calon pengantin melalui pelatihan langsung dan pendampingan oleh kader PKK dan Posyandu. Pendekatan ini relevan dengan visi ketahanan keluarga yang tidak hanya berfokus pada fungsi ekonomi tetapi juga penguatan kualitas kesehatan generasi berikutnya.

Poin penting yang juga menjadi fokus penting dari implementasi program ini adalah kesetaraan gender dalam keluarga. Dinas PPPA mempromosikan pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan, termasuk peningkatan peran ayah dalam pengasuhan dan pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan dalam struktur keluarga guna menciptakan harmoni dan stabilitas internal. Selain itu, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi prioritas utama. Dinas PPPA telah menyediakan layanan rujukan dan perlindungan bagi korban kekerasan, yang didukung oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI-PPPA). Dengan memanfaatkan teknologi, implementasi konsep ketahanan keluarga menjadi lebih luas cakupannya, memungkinkan keluarga yang rentan untuk dapat mendapatkan perlindungan dan bantuan secara cepat.

2. Implikasi Konsep Ketahanan Keluarga terhadap Keharmonisan Keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Konsep ketahanan keluarga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan nilai-nilai keluarga, dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi tantangan. Dinas PPPA Provinsi Lampung memanfaatkan konsep ini untuk mendukung keharmonisan keluarga melalui berbagai program intervensi. Keharmonisan keluarga menjadi salah satu tujuan utama dari ketahanan keluarga, karena tanpa keharmonisan, keluarga tidak dapat berfungsi secara optimal sebagai unit sosial.

Ketahanan keluarga melibatkan tiga fungsi utama: fisik, psikis, dan sosial. Ketiga fungsi ini saling mendukung dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Dengan ketahanan yang baik, keluarga mampu mengelola konflik secara konstruktif dan mempertahankan stabilitas emosi. Selain itu,

ketahanan keluarga membantu anggotanya saling mendukung dalam mengatasi berbagai tantangan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Indikator keharmonisan keluarga meliputi komunikasi yang efektif, adanya rasa saling menghargai, dan kemampuan menyelesaikan masalah bersama. Keharmonisan juga tercermin dalam pembagian peran yang seimbang di antara anggota keluarga, sehingga setiap individu merasa dihargai dan didukung. Selain itu, keharmonisan keluarga dapat diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup para anggotanya.

Keharmonisan keluarga berdampak langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi. Keluarga yang harmonis cenderung memiliki anggota yang lebih produktif, baik dalam pekerjaan maupun pendidikan. Dalam konteks sosial, keluarga yang harmonis mampu memberikan kontribusi positif kepada komunitasnya, seperti melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan pengembangan komunitas. Data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa program ketahanan keluarga telah berhasil meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga di beberapa wilayah. Misalnya, penurunan angka perceraian dan meningkatnya partisipasi keluarga dalam kegiatan sosial menjadi indikator keberhasilan. Selain itu, program ini juga menunjukkan adanya peningkatan kualitas komunikasi dalam keluarga, yang merupakan faktor utama dalam menciptakan keharmonisan.

Orang tua memegang peran utama dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Program-program yang dirancang oleh Dinas PPPA bertujuan untuk meningkatkan kapasitas orang tua dalam menjalankan peran mereka, seperti melalui pelatihan komunikasi, manajemen konflik, dan pendidikan anak. Dengan orang tua yang lebih sadar akan tanggung jawabnya, keharmonisan keluarga dapat terwujud lebih optimal. Komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Dinas PPPA memberikan perhatian khusus pada peningkatan kemampuan komunikasi antar anggota keluarga melalui program pelatihan dan konseling. Komunikasi yang efektif memungkinkan keluarga untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama dan menjaga hubungan yang sehat.

Konflik dalam keluarga adalah hal yang wajar, tetapi cara mengelola konflik

menentukan apakah keluarga tersebut dapat mempertahankan keharmonisannya. Program Dinas PPPA mencakup pelatihan manajemen konflik yang dirancang untuk membantu keluarga mengenali akar masalah dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dengan manajemen konflik yang baik, hubungan keluarga menjadi lebih kokoh. Nilai-nilai budaya lokal di Lampung, seperti semangat gotong royong dan kebersamaan, memainkan peran penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Dinas PPPA mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam program-programnya untuk memperkuat ikatan keluarga. Dengan memanfaatkan nilai budaya, program ketahanan keluarga menjadi lebih relevan dengan konteks lokal.

Faktor ekonomi sering kali menjadi penyebab utama konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, Dinas PPPA juga memberikan perhatian pada pemberdayaan ekonomi keluarga, seperti melalui pelatihan keterampilan dan akses ke sumber daya ekonomi. Dengan meningkatkan stabilitas ekonomi, tekanan dalam keluarga dapat dikurangi, sehingga keharmonisan lebih mudah terwujud. Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sangat dipengaruhi oleh tingkat keharmonisan dalam keluarga mereka. Program ketahanan keluarga yang dirancang oleh Dinas PPPA bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dengan sehat secara fisik maupun emosional. Keharmonisan keluarga membantu anak-anak merasa dicintai dan dihargai, yang penting untuk perkembangan mereka.

Keharmonisan keluarga berkontribusi pada kesejahteraan emosional setiap anggotanya. Program-program Dinas PPPA menekankan pentingnya dukungan emosional antar anggota keluarga, seperti melalui kegiatan keluarga bersama dan konseling. Dengan kesejahteraan emosional yang baik, keluarga dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Dinas PPPA bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memberikan edukasi kepada siswa dan orang tua tentang pentingnya keharmonisan keluarga. Melalui kerja sama ini, siswa diajarkan nilai-nilai keluarga yang mendukung keharmonisan, sementara orang tua diberikan pengetahuan tentang cara mendukung perkembangan anak secara optimal. Perempuan sering kali menjadi penjaga utama

keharmonisan keluarga. Dinas PPPA memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, akses ke sumber daya, dan program konseling. Dengan memberdayakan perempuan, keluarga memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menciptakan hubungan yang harmonis.

Kehadiran dan peran aktif ayah dalam keluarga sangat penting untuk menciptakan keharmonisan. Dinas PPPA mendorong partisipasi ayah dalam program-program keluarga, seperti pelatihan pengasuhan anak dan manajemen waktu. Dengan peran ayah yang lebih aktif, beban keluarga dapat terbagi secara lebih adil. Komunitas dapat memainkan peran penting dalam mendukung keluarga untuk menciptakan keharmonisan. Dinas PPPA bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menyediakan dukungan sosial bagi keluarga, seperti melalui kelompok dukungan dan kegiatan komunitas yang memperkuat ikatan sosial. Program-program yang dirancang oleh Dinas PPPA menggunakan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, emosional, dan sosial. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kebutuhan keluarga dapat terpenuhi, sehingga keharmonisan lebih mudah terwujud. Pendekatan ini juga membantu keluarga mengatasi masalah yang kompleks dengan cara yang lebih komprehensif.

Dinas PPPA secara aktif meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keharmonisan keluarga melalui kampanye dan seminar. Dengan meningkatnya kesadaran, masyarakat lebih memahami peran penting keluarga dalam menciptakan lingkungan sosial yang stabil. Keluarga yang berada dalam situasi rentan, seperti keluarga dengan penghasilan rendah atau keluarga dengan anggota yang memiliki kebutuhan khusus, sering kali menghadapi tantangan tambahan dalam menciptakan keharmonisan. Dinas PPPA menyediakan program khusus untuk mendukung keluarga-keluarga ini agar dapat mencapai keseimbangan dan keharmonisan.

Implikasi konsep ketahanan keluarga terhadap keharmonisan keluarga terlihat dalam berbagai program yang dijalankan oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berfokus pada penguatan nilai-nilai keluarga, program-program ini berhasil meningkatkan kualitas hubungan antar anggota keluarga. Untuk keberlanjutan, diperlukan integrasi yang lebih

kuat antara berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, untuk mendukung keharmonisan keluarga secara berkelanjutan. Program-program ketahanan keluarga yang dijalankan Dinas PPPA memberikan dampak positif terhadap keharmonisan keluarga. Data dari program intervensi menunjukkan peningkatan dalam kualitas hubungan antaranggota keluarga yang berpartisipasi. Keluarga yang mengikuti pelatihan komunikasi dan pengasuhan anak melaporkan adanya perbaikan dalam pola komunikasi, yang pada gilirannya memperkuat hubungan emosional antara orang tua dan anak.

Peningkatan stabilitas ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan juga berkontribusi signifikan terhadap keharmonisan keluarga. Dengan memberikan akses kepada pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha, perempuan memiliki peran ekonomi yang lebih besar dalam keluarga, yang dapat mengurangi tekanan finansial dan konflik terkait keuangan. Selain itu, penguatan komunikasi dalam rumah tangga melalui pelatihan keterampilan komunikasi efektif membantu keluarga mengatasi masalah secara bersama-sama.

Upaya pencegahan stunting dalam program 1000 HPK memiliki implikasi jangka panjang terhadap keharmonisan keluarga. Anak-anak yang tumbuh dengan gizi baik dan lingkungan pengasuhan yang optimal cenderung lebih sehat secara fisik dan mental. Hal ini menciptakan hubungan keluarga yang lebih stabil karena orang tua tidak perlu menghadapi beban tambahan akibat masalah kesehatan anak.

3. Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Konsep Ketahanan Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan kerangka utama dalam hukum Islam yang berfokus pada perlindungan dan pengembangan lima elemen pokok: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks ketahanan keluarga, *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan panduan normatif yang tidak hanya relevan secara spiritual tetapi juga strategis dalam membangun keluarga yang tangguh. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mendukung kebijakan ketahanan keluarga di Dinas PPPA Provinsi Lampung.

Ketahanan keluarga dalam *maqāṣid al-syarī'ah* berkaitan langsung dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan), yang mencakup perlindungan terhadap struktur dan nilai-nilai keluarga. Selain itu, *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl* menjadi elemen penting untuk memastikan kesejahteraan emosional, fisik, dan ekonomi dalam keluarga. Pendekatan holistik ini menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan yang kokoh dalam membangun keluarga yang harmonis. Kemudian prinsip *ḥifẓ al-dīn* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan pentingnya nilai-nilai agama sebagai dasar dalam kehidupan keluarga. Dinas PPPA Provinsi Lampung mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam program-program keluarga, seperti konseling berbasis agama dan pelatihan pengasuhan anak yang menekankan pentingnya spiritualitas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang memiliki pijakan moral yang kuat.

Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dalam konteks ketahanan keluarga mencakup upaya menjaga kesehatan fisik dan mental anggota keluarga. Dinas PPPA menyediakan layanan konseling untuk membantu keluarga mengatasi tekanan emosional dan konflik internal. Selain itu, pelatihan manajemen stres diberikan untuk memastikan setiap anggota keluarga mampu menghadapi tantangan dengan mental yang sehat. Selanjutnya, upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga mencerminkan penerapan prinsip *ḥifẓ al-nafs*, karena melindungi anggota keluarga dari dampak negatif kekerasan fisik maupun emosional. Layanan rujukan bagi korban kekerasan memastikan bahwa keluarga yang rentan tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan.

Prinsip *ḥifẓ al-'aql* merupakan elemen fundamental dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang diterapkan dalam kebijakan ketahanan keluarga. Program edukasi keluarga yang dirancang oleh Dinas PPPA meliputi pelatihan literasi keuangan, pengasuhan anak, dan pengembangan keterampilan komunikasi. Dengan meningkatkan kapasitas intelektual anggota keluarga, diharapkan tercipta keluarga yang lebih mandiri dan harmonis. Prinsip *ḥifẓ al-nasl* menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan generasi melalui pendidikan yang baik dan pengasuhan yang benar. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada pendidikan anak untuk memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang

mendukung. Anak-anak dan generasi muda merupakan aset penting dalam kerangka *hifz al-nasl*. Dinas PPPA menyelenggarakan program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak dan remaja. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi yang tangguh, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Lebih lanjut program 1000 HPK merupakan implementasi konkret dari prinsip *hifz al-nasl*, karena memastikan tumbuh kembang generasi mendatang melalui pengasuhan berkualitas. Program ini juga mendukung pencegahan stunting sebagai langkah menjaga kesehatan fisik anak-anak, yang merupakan bagian dari keberlangsungan keturunan. Anak-anak dan generasi muda merupakan aset penting dalam kerangka *hifz al-nasl*. Dinas PPPA menyelenggarakan program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak dan remaja. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi yang tangguh, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Stabilitas ekonomi keluarga menjadi salah satu fokus utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah* melalui prinsip *hifz al-māl*. Dinas PPPA memberikan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga dan menyediakan akses ke program pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, tekanan finansial yang sering menjadi sumber konflik dalam keluarga dapat diminimalkan. Kebijakan ketahanan keluarga di Provinsi Lampung diintegrasikan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menciptakan pendekatan yang holistik. Kebijakan ini mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi, yang semuanya saling mendukung dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Pendekatan ini juga memastikan bahwa program yang diterapkan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, tokoh agama memiliki peran penting dalam mendukung implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kebijakan keluarga.

Dinas PPPA perlu bekerja sama dengan ulama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan keluarga. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat aspek spiritual tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program keluarga. Selain itu, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan dan wirausaha mendukung stabilitas finansial keluarga, sehingga

mengurangi konflik terkait keuangan. Stabilitas ekonomi keluarga juga membantu memastikan kebutuhan dasar anggota keluarga terpenuhi secara konsisten

Salah satu implementasi konkret *maqāṣid al-syarī'ah* adalah pengembangan modul pendidikan keluarga berbasis nilai-nilai Islam. Modul ini mencakup panduan tentang pengasuhan anak, manajemen konflik, dan pengelolaan keuangan keluarga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan modul ini, keluarga dapat lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Konflik dalam keluarga sering kali dapat diselesaikan dengan pendekatan spiritual. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* mengajarkan pentingnya perdamaian, empati, dan saling memaafkan. Program pelatihan manajemen konflik yang diselenggarakan oleh Dinas PPPA menggunakan pendekatan ini untuk membantu keluarga menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara yang konstruktif.

Perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, pemberdayaan perempuan mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan dan ekonomi, serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan peran sebagai ibu dan istri. Dinas PPPA menyediakan berbagai program untuk mendukung pemberdayaan ini. *Maqāṣid al-syarī'ah* juga menekankan pentingnya peran ayah dalam membangun keluarga yang harmonis. Program Dinas PPPA dirancang untuk meningkatkan partisipasi ayah dalam pengasuhan anak dan pengambilan keputusan keluarga. Dengan keterlibatan aktif ayah, beban emosional dalam keluarga dapat terbagi secara lebih seimbang.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam penelitian ini, implementasi konsep ketahanan keluarga di Dinas PPPA Provinsi Lampung sudah berjalan dengan baik melalui berbagai program, seperti konseling keluarga, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Program-program ini dirancang untuk memperkuat fungsi keluarga secara menyeluruh, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Dampak positif yang terlihat mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan

keluarga, penurunan konflik internal, dan peningkatan partisipasi keluarga dalam pembangunan sosial. Meskipun demikian, masih terdapat kendala terkait akses terbatas di wilayah terpencil dan kekurangan sumber daya manusia yang terlatih.

Ketahanan keluarga juga berpengaruh signifikan terhadap terciptanya keharmonisan keluarga. Program konseling keluarga dan pelatihan manajemen konflik terbukti membantu keluarga mengatasi tekanan emosional dan memperbaiki komunikasi antar anggota keluarga. Selain itu, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan dan akses modal usaha turut mengurangi konflik finansial dalam rumah tangga, yang berujung pada hubungan keluarga yang lebih stabil dan harmonis.

Seluruh program yang dijalankan oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung juga sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, seperti ḥifz al-dīn, ḥifz al-nafs, ḥifz al-'aql, ḥifz al-nasl, dan ḥifz al-mal. Program pengasuhan anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) mencerminkan penerapan prinsip ḥifz al-nasl, sedangkan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan kerja mendukung prinsip ḥifz al-mal. Layanan konseling yang diberikan juga membantu menjaga kesejahteraan emosional sesuai dengan prinsip ḥifz al-nafs. Pendekatan ini menunjukkan bahwa integrasi antara nilai agama dan kebijakan publik mampu menciptakan keluarga yang tangguh dan harmonis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian lanjutan diperlukan untuk lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh keluarga di daerah terpencil dan kelompok rentan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan program-program yang lebih spesifik dan berbasis kebutuhan lokal, seperti pelatihan pengasuhan berbasis budaya atau pelatihan ekonomi kreatif.

Selain itu, Dinas PPPA diharapkan dapat memperluas kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan program. Kolaborasi ini sangat penting untuk mencakup kampanye kesadaran keluarga, pemberdayaan perempuan,

serta penguatan layanan konseling berbasis komunitas.

Pengembangan platform digital juga sangat diperlukan, seperti aplikasi edukasi keluarga, konseling daring, dan portal informasi mengenai ketahanan keluarga, yang dapat memperluas akses layanan ke masyarakat yang sulit dijangkau. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi dampak program secara real-time.

Terakhir, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas konselor keluarga, kader masyarakat, dan petugas lapangan. Selain itu, pengembangan kerangka evaluasi yang terintegrasi sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan memberikan dampak yang nyata terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, A. (1975). *Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsih.
- Artado. (2019). Efektivitas program ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah pasca pernikahan di KUA Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Aulia, R., Ridho, M., & Rapli, A. (2020). Ketahanan keluarga: Tinjauan kebersamaan keluarga menghadapi tekanan perekonomian di Kota Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 2(3), 333-340. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v2i3.32>.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2017). *Penanaman dan penerapan nilai karakter melalui 8 fungsi keluarga*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2023). *Laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2023 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung*.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Grafi Indonesia.
- Kembaren, N. S. B. (2016, October 6). Perbedaan keharmonisan keluarga ditinjau dari istri yang bekerja dan tidak bekerja. *Repositori*

- UMA.
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/2005>.
- Kuntur, R. (2004). *Metode penelitian untuk penulisan skripsi*. Jakarta: PPM.
- Meichiati. (2016). *Membangun keharmonisan keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Musyarofah. (2021). Pendidikan agama sebagai dasar dalam membangun ketahanan keluarga. *JSGA: Journal Studi Gender Anak*, 8.
<https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5502>.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. (2018).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. (1994).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. (2014).
- Soejono Soekanto. (2013). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2002). *Metode penelitian*. Jakarta: Kencana Predana.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syah, A. A., Bustomi, I., & Kodir, F. A. (2023). Kajian modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dan fondasi keluarga sakinah bacaan mandiri calon pengantin perspektif filsafat hukum keluarga Islam Ibnu 'Āsyūr. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 71-85.
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13515>.
- Taurat Afiati, A. W., & Sofyan, M. S. (2022). Upaya pasangan suami istri tidak memiliki keturunan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga*, 14(2), 161-184.
<https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927>.
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. (2009).
- Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).
- Walsh, F. (2002). A family resilience framework: Innovative practice applications. *Family Relations*, 51, 130-137.
<https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2002.00130.x>.
- Winarto. (2008). *Memahami pengolahan data*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarto. (1994). *Pengantar penelitian-penelitian ilmiah: Dasar, metode, teknik*. Bandung: Tarsito.